

## KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILPRES TAHUN 2014 DI KOTA SURAKARTA

Oleh:

Jemi<sup>1</sup>, Damayanti Suhita<sup>2</sup>, Aris Tri Haryanto<sup>3</sup>

### **Abstract**

*This research uses a qualitative descriptive method. The informants of this research were gathered from the purposive sampling followed by snowball sampling the source of data used in this research is in form of primary and secondary data. The techniques of collecting data are by interview, documentation, and literature study. The data analysis technique used in this research is an interactive analysis which consists of data reduction, data presentation, and conclusion.*

*The result of the research of KPU Surakarta's performance in executing the general election of President and vice President in increasing political participation in 2014 is considered good, in terms of : (1) it is conformed with the applicable laws and regulations; law number 15 of 2011, law number 42 of 2008, law number 14 of 2008, and the regulation of electoral commission that regulates the technical issues. (2) The KPU of Surakarta used strategy and partnership based-approach (office Channeling), like structural approach, Status Classification approach, and cultural approach. (3) The budget for the implementation of the Presidential and vice Presidential election in Surakarta is fully financed by APBN (national budget) in its implementation, it had been effective and efficient, with the presence of DIPA (the checklist of the budget use), from the accountability aspect of the budget use, KPU of Surakarta had been good administration. Moreover, the administration had been reported regularly in accordance with the applicable regulations. (4) The human resources of KPU of Surakarta was very adequate in implementing the 2014 Presidential election as many 11.654 people. (5) The approach used was administrative, consultative, and also supported with the existence of KPU of Surakarta website. (6) the factors that influenced the level of political participation in the Presidential election held in Surakarta were: Personage, Leadership, the effectiveness of the socialization of KPU of Surakarta, The same hope, The quality of the Voters, vision-mission and programs offered by the candidates of President and vice President. (7) The KPU of Surakarta had served all citizens of Surakarta fairly. (8) The research's result indicate that there is 81,23 % of correlation between the KPU of Surakarta's performance and the political participation in presidential election of 2014 in Surakarta.*

**Key Words:** *Performance, KPU of Surakarta, Political Participation.*

---

### **Pendahuluan**

Negara kita menganut asas demokrasi. Salah satu wujud dengan adanya dengan demokrasi tersebut adalah dengan diadakannya pemilihan terhadap pemimpin baik itu eksekutif dan legislatif pada tingkat pusat sampai daerah. Dalam pelaksanaan pemilihan tersebut di laksanakan atau di kelola oleh lembaga Negara yang bernama komisi pemilihan

umum (KPU), dan komisi pemilihan umum untuk tingkat daerah (KPUD).

Komisi pemilihan umum (KPU), adalah lembaga Negara yang di berikan mandat oleh konstitusi kita untuk menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR/ DPD/ DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten. Sebelum pemilu tahun 2004 KPU dapat terdiri dari anggota-

---

<sup>1</sup> Penulis

<sup>2</sup> Pembimbing 1

<sup>3</sup> Pembimbing 2

anggota yang merupakan sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 /2000 pada Tahun 2000, maka di haruskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan atau bukan berasal dari partai politik. Itu artinya bahwa KPU adalah lembaga Negara yang bersifat netral dalam menjalankan tugas nya.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU pusat atau pun KPUD di daerah-daerah menjadi tantangan bagi KPU dan KPUD untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. KPU dan KPUD memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena golput tampaknya menjadi tantangan sekaligus permasalahan serius yang memang harus di tekan dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi tantangan bagi KPU dan KPUD untuk bagaimana strategi yang dilaksanakan dalam menekan angka golput seminimal mungkin.

Melihat kinerja KPU Kota Surakarta dalam pileg tahun 2014, yang berhasil meningkatkan partisipasi politik sebesar 76,07 % (sumber: database KPU Kota Surakarta, diolah). Sebelumnya pada Pileg tahun 2009 tingkat partisipasi politik sebesar 71,62 % (sumber: database KPU Kota Surakarta, diolah). Dengan menurunnya angka golput tersebut menepis kekhawatiran berbagai kalangan yang sebelumnya memprediksi angka golput akan mencapai 30 persen. Melihat pencapaian ini harus kita akui bahwa kinerja KPU Kota Surakarta berhasil menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat Surakarta meskipun belum sepenuhnya. Dan juga Kota Surakarta mencatat prestasi tersendiri dalam Pilpres 2014. Tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilih mencapai 81,23 persen (sumber: Database KPU Kota Surakarta, diolah). Angka tersebut merupakan capaian tertinggi tingkat partisipasi warga Solo dalam mengikuti kontestasi politik sejak reformasi politik 1998. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyono, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu

Pilpres 2014, Rabu 16 Juli 2014 sore hari kepada detiknews.

Dengan melihat perkembangan demokrasi di Indonesia yang akan terus maju menjadi lebih baik lagi, penulis menyadari betapa pentingnya penelitian ini dan masih sangat diperlukan bagi instansi terkait dan perkembangan demokrasi di bangsa kita ini.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini yang dijadikan dasar penelitian adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan Taylor yang dimaksud penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Lexi J. Moleong, 2007).

Penelitian ini mengambil lokasi di komisi pemilihan umum (KPU) Kota Surakarta. Alasan yang mendasari pengambilan lokasi ini adalah dengan dasar peneliti melihat keberhasilan KPU Kota Surakarta dalam menjalankan perannya dalam proses pemilu presiden dan pemilu legislatif, dengan menekan angka golput seminimal mungkin.

Sumber data utama dari metode penelitian kualitatif ini adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah dokumen dan data-data lainnya. Kata-kata atau tindakan orang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, yang didokumentasikan melalui catatan utama di rekaman audio maupun foto. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara dan pengamatan merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengar dan bertanya. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan (Lexi J. Moleong, 2007). Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui pengamatan dan wawancara. Bersumber dari pihak-pihak yang dijadikan informan untuk diwawancarai yaitu komisioner KPU Kota Surakarta dan jajarannya yang terkait. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung. Bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, laporan-laporan,

dan bacaan yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengambilan sampel/informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau disebut sampel bertujuan, yaitu informan yang di tarik dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Dalam hal ini, informan yang dipilih adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya atau menguasai permasalahannya (Wiersma, 1995).

Sedangkan dalam penelitian informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu informan yang menjadi kunci dapat menunjuk sumber informan lain yang di pandang lebih menguasai data-data yang diperlukan, sehingga sebagai sampel akan benar-benar menggambarkan sifat dari populasi atau objek keseluruhan sasaran penelitian. Dalam pengambilan informan selama penelitian ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, antara lain: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta dan Anggota-anggota beserta staf dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta.

Dalam penelitian ini sumber data yang menjadi tumpuan analisis penelitian adalah didapat dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung melalui dokumentasi, studi pustaka serta buku-buku maupun penunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Menurut Patton dalam (Lexi J. Moleong, 2007), teknik analisis data adalah proses katagori urutan data, pengorganisasiannya ke dalam suatu pola, katagori dan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam (Lexi J. Moleong, 2007) analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada

tema dan hipotesis tersebut. Jika dikaji definisi pertama lebih kepada pengorganisasian data. Sedangkan definisi yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dan dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kaeagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terdapat dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah langkah-langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data yang dilakukan dengan jalan rangkuman yang inti, proses dengan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga agar tetap berada didalamnya. Langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan- satuan itu dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Tahap akhir dari analisis data ini adalah pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan metode tertentu (Lexi J. Moleong, 2007).

Menurut Miles dan Huberman dalam (Lexi J. Moleong, 2007) pada dasarnya analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigm positivisme. Analisis data dilakukan dengan mendasarkan diri penelitian lapangan apakah: satu atau lebih dari satu situs. Jadi, seorang analisis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu situs atau lebih. Dalam penelitian ini dilaksanakan pada satu situs yaitu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis interaktif yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses siklus.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Kinerja KPU Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilpres Tahun 2014 Di Kota Surakarta

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau laporan/ program/ kebijakan/ dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik *planning* suatu organisasi. (Mohammad Mahsun, 2006). Pengertian kinerja menurut Prawiro Sentono sebagai berikut: Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam perusahaan sesuai dengan dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan perusahaan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawiro Sentono , 2002).

“Wahyudi Kumorotomo (2002) mengembangkan kinerja sebagai sistem nilai yang dianut oleh sekelompok orang, yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan administratif, tidak hanya menyangkut pekerjaan-pekerjaan fisik tetapi juga menyangkut proses berpikir dan mengambil keputusan “.

“Menurut A. A Anwar Prabu Mangkunegara (2009) dalam bukunya yang berjudul evaluasi kinerja sumber daya manusia definisi kinerja adalah: hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya “.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah prestasi atau hasil kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh sumber daya manusia kurun waktu tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang secara keseluruhan selama periode tertentu

didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam hal ini, menurut peneliti yang dimaksud dengan kinerja adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Pada dasarnya pengertian kinerja berkaitan dengan tanggungjawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Mohamad Mahsun (2006) pengukuran kinerja sektor publik meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan dapat langsung tercapai baik dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*) adalah adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan dalam jangka menengah dan berdampak langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang dapat ditimbulkan baik bersifat positif atau negatif.

Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kota Surakarta KPU kota Surakarta membutuhkan input berupa: Anggaran, Peraturan PerUndang-Undangan, dan Sumber Daya Manusia. Anggaran pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden di seluruh wilayah Indonesia termasuk di kota Surakarta sepenuhnya dibiayai dari APBN dan

KPU kota Surakarta tidak mendapat hibah dari pihak manapun. Dalam penggunaan anggaran yang didapat dari APBN untuk pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dalam pelaksanaannya sudah efektif dan efisien, dengan adanya DIPA (daftar isian penggunaan anggaran), dari aspek akuntabilitas penggunaan anggaran KPU kota Surakarta sudah tertib administrasi. Dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan perUndang-Undangan yang menjadi pedoman atau landasan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Surakarta adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan PKPU yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan secara teknis. KPU Kota Surakarta memiliki sumber daya manusia dalam menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Kota Surakarta tahun 2014 dengan keseluruhan/total Sumber Daya Manusia sebanyak 11.654 orang. Jumlah ini sudah mencakup KPU Kota Surakarta, PPK, PPS, KPPS, dan petugas ketertiban.

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Surakarta KPU Kota Surakarta membutuhkan konversi berupa: Realibilitas, responsivitas, *equity*, dan responsibilitas.

Realibilitas dilihat dari pendekatan pelayanan yang diberikan oleh KPU kota Surakarta dalam pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014 di Kota Surakarta yaitu : pendekatan administratif, pendekatan konsultatif, sesuai dengan Undang-Undang keterbukaan teknologi informasi, dan di tunjang dengan adanya web KPU Kota Surakarta yang dapat diakses oleh masyarakat. Pendekatan administratif adalah untuk masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Pendekatan konsultatif adalah

KPU kota Surakarta membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang mau berkonsultasi atau datang ke kantor KPU Kota Surakarta.

Responsivitas kinerja KPU Kota Surakarta melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan partisipasi politik Tahun 2014 di Kota Surakarta diketahui dari konsep, pendekatan dan strategi yang digunakan oleh KPU Kota Surakarta yaitu: pendekatan struktur berbasis kemitraan/ *office channelling*, pendekatan kultur berbasis kemitraan/ *office channelling*, dan pendekatan budaya berbasis kemitraan/ *office channeling*.

*Equity* adalah adanya distribusi yang adil dan dilayaninya masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan KPU kota Surakarta dalam hal melakukan verifikasi data pemilih dengan dibantu oleh PPK dan PPS yang merupakan badan penyelenggara yang bersifat *adhoc*. Dalam proses tersebut KPU Kota Surakarta juga dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarliah). Dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014. Untuk validitas data pemilih KPU Kota Surakarta menggunakan sistem SIDALIH yaitu sistem data pemilih secara komputerisasi yang terkoneksi dari daerah sampai pusat. Sehingga tingkat kesalahan data pemilih dapat diminimalisir.

Responsibilitas merupakan suatu konsep yang menjelaskan kesesuaian pelaksanaan kegiatan KPU Kota Surakarta dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan organisasi. Kaitannya dengan kinerja KPU Kota Surakarta dalam melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Tahun 2014 kegiatan KPU Kota Surakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, sesuai dengan prosedur. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2008 Tentang pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang secara teknis dan spesifik mengatur hal-hal yang bersifat teknis.

*Output* dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 untuk meningkatkan partisipasi politik di Kota Surakarta diketahui dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kota Surakarta memiliki sumber daya manusia yang memadai dan mencukupi dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggaran yang digunakan berasal dari APBN dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Keterkaitan Kinerja KPU Kota Surakarta Dengan Tingkat Partisipasi Politik Pada Pilpres Tahun 2014 Di Kota Surakarta**

Dengan kinerja KPU kota Surakarta yang sudah sesuai dengan input, *coversi* dan *output* memiliki keterkaitan terhadap pencapaian tingkat partisipasi politik pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Surakarta yang mencapai 81,23 % (Sumber: Database KPU Kota Surakarta, diolah). Hal ini merupakan pencapaian tertinggi KPU Kota Surakarta sejak diselenggarakan dan dilaksanakan nya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dari tahun-tahun sebelumnya.

Tingkat partisipasi politik merupakan indikator untuk melihat sukses atau tidaknya pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Dan juga tingkat partisipasi politik dapat dijadikan indikator kualitas pelaksanaan pemilu yang sudah dilaksanakan. Dalam hal ini, KPU Kota Surakarta berhasil meningkatkan partisipasi politik pada Pilpres tahun 2014 di Kota Surakarta, dengan menggunakan konsep, pendekatan dan strategi kemitraan (*office channelling*)

dengan pihak pihak yang berkepentingan. Adapun konsep, pendekatan dan strategi yang digunakan adalah: pendekatan struktur (*office channelling*), pendekatan kultur (*office channelling*), dan pendekatan kultur (*office channelling*). Selain menggunakan konsep, strategi dan pendekatan di atas dalam meningkatkan partisipasi politik pada pilpres tahun 2014 di Kota Surakarta, tingkat partisipasi politik pada pilpres juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: faktor ketokohan, kepemimpinan, adanya harapan yang sama, kualitas data pemilih dan visi, misi serta program dari calon Presiden dan Wakil Presiden.

#### **C. Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Pada Pileg Dan Pilpres Tahun 2009 Dengan Pileg Dan Pilpres Tahun 2014.**

Dalam catatan sejarah pemilu, tingkat partisipasi pemilih merupakan bagian penting yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kualitas pemilu. Partisipasi merupakan elemen dasar dalam demokrasi perwakilan menjadi suatu fenomenal, karena ketika mendengar kata “partisipasi” maka yang muncul sebagai pengimbang adalah kata “ golput “. Golput menjadi alasan pembenar terjadinya fenomena terputusnya relasi antar wakil dan yang terwakili (*disconnect electoral*) atau kesenjangan electoral, yang pada akhirnya akan melahirkan ketidakpercayaan (*distrust*) rakyat kepada wakilnya.

Pemilu dikatakan berhasil, salah satu tolak ukurnya adalah seberapa besar tingkat signifikansi kreasi sosialisasi yang dilakukan dapat mengungkit partisipasi pemilih. Karena keberhasilan sosialisasi akan selalu dikaitkan dengan tingkat partisipasi. Jika ditilik perbandingan dari catatan sejarah, kurun waktu pemilu Tahun 2009 dan pemilu Tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih di Kota Surakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2009 tingkat partisipasi politik pada pilpres adalah sebesar 76,06 % dan tahun 2014 tingkat partisipasi politik pada

pilpresnya adalah sebesar 81,23 % (Terjal Konsolidasi Demokrasi “ Untold Story Pemilu 2014 “ , Agus Sulisty, dkk, 2014).

Melihat pencapaian dari Pilpres tahun 2014 di Kota Surakarta yang melebihi target capaian yang di gariskan oleh KPU Republik Indonesia yaitu sebesar 75%. Maka patut disyukuri bahwa ditengah ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat kepada pejabat-pejabat Negara yang dihasilkan melalui pemilu (DPR, DPD, dan DPRD) ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum di Negara yang tingkat korupsinya semakin memprihatinkan. Artinya dalam hal ini pemilihan umum tahun 2014 merupakan momentum dan angin segar yang diyakini dapat membawa perubahan politik kearah yang lebih baik yang berimplikasi terhadap perbaikan konsolidasi demokrasi di Negara Indonesia

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja komisi pemilihan umum Kota Surakarta dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pilpres tahun 2014 dan berdasarkan pembahasan masalah yang telah dilakukan, maka peneliti menarik simpulan bahwa pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam KPU Kota Surakarta sudah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu: Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, dan PKPU yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan secara teknis.

Dana/anggaran di peroleh KPU Kota Surakarta dari APBN. Dalam pelaksanaannya sudah efektif dan efisien, dengan adanya DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), dari aspek akuntabilitas penggunaan anggaran KPU Kota Surakarta sudah tertib administrasi. Dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPU Kota Surakarta memiliki sumber daya manusia dalam menyelenggarakan

pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Kota Surakarta Tahun 2014 dengan keseluruhan/ total Sumber Daya Manusia sebanyak 11.654 orang. Pendekatan pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota Surakarta yaitu pendekatan administratif, pendekatan konsultatif, Undang-Undang Keterbukaan Teknologi Informasi, dan di tunjang dengan adanya *web* KPU kota Surakarta. Konsep, Strategi dan pendekatan dalam meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta berbasis kemitraan (*office channeling*) dengan konsep, pendekatan dan strategi sebagai berikut: Pendekatan Struktur (*office channeling*), Pendekatan Kultur (*office channeling*), dan Pendekatan budaya (*office channeling*).

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pasrtisipasi politik masyarakat Kota Surakarta pada Pilpres tahun 2014 adalah: faktor ketokohan, faktor kepemimpinan, efektivitas sosialisasi oleh KPU Kota Surakarta, adanya harapan yang sama, kualitas data pemilih, dan visi, misi dan program dari calon presiden dan wakil presiden. KPU Kota Surakarta melayani semua masyarakat secara adil dengan melakukan verifikasi , penyusunan, dan penetapan data pemilih sesuai dengan peraturan yang perUndang-Undangan yang berlaku. Adanya keterkaitan antara kinerja KPU Kota Surakarta terhadap tingkat partisipasi politik pada pilpres Tahun 2014 di Kota Surakarta dengan melihat pencapaian tingkat partisipasi pada pilpres tahun 2014 di Kota Surakarta yang mencapai 81,23 %.

Dengan baiknya kinerja KPU kota Surakarta yang sudah melebihi target capaian partisipasi yang di gariskan KPU Republik Indonesia yaitu sebesar 75 %, maka hal ini patut disyukuri sebagai *progress* yang positif ditengah situasi politik dimana masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap lembaga Negara terutama yang dihasilkan melalui pemilu. Pemilu tahun 2014 menjadi pintu pembuka adanya perubahan politik yang

berimplikasi terhadap perbaikan arah konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Rekomendasi yang peneliti sampaikan sehubungan dengan kinerja komisi pemilihan umum Kota Surakarta dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, dan guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang adalah: Adanya pendidikan pemilih yang berkesinambungan di sekolah, di kampus-kampus, dan kepada masyarakat umum dengan atau berbasis kemitraan atau (*office channeling*).

#### **Daftar Pustaka**

- Mahsun, Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta, 2006.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moloeng Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ptremaja Roesda Karya, Bandung, 2007.
- Sulistyo Agus, dkk, *Terjal Konsolidasi Demokrasi “ Untold Story Pemilu 2014 “*. KPU Kota Surakarta, Surakarta, 2014.
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Wiersma, William. *Research Methods In Education: An Introduction Sixth Edition*, Allyn And Bacon, Boston, 1995.

#### **Referensi Dari Undang-Undang Dan Peraturan**

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

PKPU nomor 4 tahun 2014 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014.

#### **Referensi Dari Media Online**

KPU-surakarta.go.id

[http://id.Wikipedia.Org/wiki/komisi\\_pemilihan\\_umum](http://id.Wikipedia.Org/wiki/komisi_pemilihan_umum).

<Http://News.Detik.Com/Read/2014/07/23/180617/2646389/1562/Partisipasi-Pemilih-Di-Pilpres-2014-Menurun-Ini-Penjelasan-Kpu>